

Pendapatan Asli Daerah- Pendapatan Asli Daerah Maros Sulsel Rp92 Miliar hingga Mei 2024



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/06/05/pendapatan-asli-daerah-maros-sulsel-rp92-miliar-atau-3259-persen-dari-target>

Hampir satu semester namun capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) baru mencapai 32.59 persen.

Kepala Bapenda Maros, Andi Baso Arman mengatakan dari target Rp283 miliar, realisasi hingga bulan ini baru mencapai Rp92 miliar.

Ia menyebutkan, dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD baru enam berhasil melampaui target 30 persen.

“Bapenda, Perikanan, PUPR, Dinas Kesehatan, DLH dan RSUD dr La Palaloi,” katanya, Rabu (5/6/2024).

Bapenda targetnya sebesar Rp180 miliar baru mencapai 30,87 persen atau Rp55 miliar.

Dinas Perikanan ditarget Rp850 juta berhasil mengumpulkan 37,30 persen atau Rp317 juta.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan ditarget Rp350 juta berhasil mengumpulkan 39,43 atau Rp138 juta.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Dinas Kesehatan ditarget Rp27 miliar berhasil mengumpulkan 36,35 persen atau Rp10 miliar.

Cegah diabetes untuk selamanya! Gula turun menjadi 3,9 dalam sekejap mata!

RSUD dr La Palaloi baru Rp21 miliar atau 39,40 persen dari target Rp54 miliar.

Dinas Lingkungan Hidup Rp52 juta atau 34,93 persen dari target Rp150 juta.

Sementara kata dia masih ada empat OPD belum melampaui target 30 persen.

“Yang belum capai target Dinas Pertanian, Pariwisata, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dan Kopumdag,” sebutnya.

Kalau Dinas Pertanian baru menghasilkan Rp123 juta atau 20,57 persen dari target Rp600 juta.

Dinas Pariwisata berhasil mengumpulkan Rp1,7 miliar atau 24,67 persen dari target Rp7 miliar.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mengumpulkan Rp2,1 miliar atau 25,23 persen dari target Rp8,5 miliar.

Kemudian Kopumdag Rp766 juta atau 20,99 persen dari target Rp3,6 miliar.

Mantan Kadis Kominfo itu mengatakan kendala dihadapi Dinas Pariwisata adalah cuaca yang tidak menentu mengakibatkan pengunjung yang datang berkurang.

“Kalau Dinas Pertanian alsintannya diperiksa oleh BPK sehingga kurang maksimal dalam meraih retribusi sewa alsintan,” katanya.

Sementara untuk Dinas Penanaman Modal masih kurangwarga yang mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung.

Terkait dengan hal tersebut, Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) hingga triwulan II mencapai Rp4,7 triliun atau sekitar 47 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp10 triliun.

"Ini adalah realisasi pendapatan hingga akhir Juni 2024," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel, Reza Faisal Saleh di Makassar, Rabu kemarin.

Dia mengatakan, dari capaian pendapatan pada triwulan II itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan sumbangan Rp2,4 triliun lebih. Sementara dana transfer dari pemerintah pusat Rp2,2 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp2,3 miliar.

Realisasi pendapatan daerah Sulsel hingga Juni 2024 itu naik 10 persen dibandingkan periode yang sama 2023 yang hanya meraih pendapatan Rp445 miliar.

Sementara dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, realisasi PAD 2023 Bapenda Luwu melebihi target yakni Rp207 miliar lebih.

Khusus pendapatan Sulsel secara keseluruhan pada 2024, lanjut dia, pihaknya optimistis dapat mencapai target, karena dinilai beberapa bulan ke depan pendapatan akan lebih banyak masuk di Semester II 2024.

Menurut dia, pada Juni 2024 capaian pendapatan hampir mencapai 50 persen, sehingga sisanya di Semester 2 dinilai tidak terlalu berat mencapai target 2024.

Adapun target 2024 sebanyak Rp10 triliun rinciannya PAD sebesar Rp5,46 triliun ditambah dana transfer pusat Rp4,5 triliun.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/05/pendapatan-asli-daerah-maros-sulsel-rp92-miliar-atau-3259-persen-dari-target>
2. <https://era.id/daerah/160850/pendapatan-pemprov-sulsel-hingga-triwulan-ii-2024-capai-rp4-7-triliun>

Catatan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.